

PERANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA AIR PANAS SUAMAN DI KABUPATEN ROKAN HULU

Solihati Hariani¹, Seprini², Andi Afrizal³

^{1,2,3} Universitas Pasir Pengaraian, Rokan Hulu, Indonesia

Email: solihatihariani@gmail.com, seprinimyd@gmail.com, Andiafrizal07@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of the Tourism and Culture Office in developing the Suaman Hot Springs tourist attraction in Rokan Hulu Regency and identify the obstacles encountered in the development process. The Suaman Hot Springs tourist attraction is a natural tourist attraction with significant potential but has not been optimally managed, particularly in terms of facilities, accessibility, and promotion. This study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Informants included officials from the tourism office, tourism managers, and visitors. The results indicate that the Tourism and Culture Office has carried out its role in planning, development, policy formulation, and supervision of tourist attraction management. However, budget constraints, inadequate infrastructure, and low community participation are the main obstacles to the development of this tourist attraction. Therefore, cross-sectoral collaboration and community empowerment are needed to improve the quality and competitiveness of the Suaman Hot Springs tourist attraction in a sustainable manner.

Keywords: Role, Tourism and Culture Office, Tourism Development, Suaman Hot Springs, Rokan Hulu.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan objek wisata Air Panas Suaman di Kabupaten Rokan Hulu serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pengembangannya. Objek wisata Air Panas Suaman merupakan salah satu daya tarik wisata alam yang memiliki potensi besar namun belum dikelola secara optimal, terutama dari segi fasilitas, aksesibilitas, dan promosi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pihak dinas, pengelola objek wisata, serta pengunjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menjalankan peran dalam bentuk perencanaan, pembangunan, penyusunan kebijakan, dan pengawasan pengelolaan objek wisata. Namun, keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam pengembangan objek wisata ini. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing objek wisata Air Panas Suaman secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Peranan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengembangan Wisata, Air Panas Suaman, Rokan Hulu.

PENDAHULUAN

Kabupaten Rokan Hulu memiliki banyak potensi wisata dan dapat 5 konsep yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata sejarah dan wisata kuliner. Konsep wisata tersebut meliputi banyak objek dan daya tarik wisata didalamnya. Keragaman adat dan budaya semakin memperkaya kabupaten rokan hulu.

Kerukunan dalam masyarakat menjadikan rokan hulu sebagai destinasi yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Berdasarkan jurnal yang dikemukakan oleh (Gunadi & Rusli, 2022) Yoeti, 2008: 4 dikatakan bahwa indonesia memiliki hamparan geografis yang luar yang di berkahi wilayah yang sangat luas dengan didukung sumber daya alam yang beraneka ragam yang berpotensi untuk diolah dan dimanfaatkan, salah satunya adalah pariwisata yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Nasional. Salah satu jenis wisata alam yang populer di indonesia adalah wisata alam. Jenis wisata inilah yang paling utama bagi wisatawan mancanegara yang ingin mengetahui kebudayaan, kesenian, dan segala sesuatu yang dihubungkan dengan adat-istiadat dan kehidupan seni budaya.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang ada di indonesia dari 34 provinsi. Di Setiap daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dimana perkembangan industri pariwisata di kabupaten rokan hulu mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UUD Nomor 25 Tahun 2004 yang berisikan tentang salah satu pendekatan penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan nasional (Haqqi, 2022)

Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui dinas pariwisata dan kebudayaan berusaha memfokuskan program pengembangan pariwisata, salah satunya yaitu wisata Air Panas Hapanasan sebagai salah satu objek wisata yang ada di kabupaten Rokan Hulu. Pada wisata Air Panas Hapanasan ini mengalami penurunan pada jumlah pengunjungnya sebanyak 1059 orang, penurunan ini terjadi dari tahun 2017 yang semula dikunjungi 38.993 orang menjadi 37.934 orang. Penurunan jumlah wisatawan yang berasal dari berbagai wilayah disebabkan oleh minimnya informasi yang ada serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan untuk menuju lokasi wisata yang ada di kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh (Nurhidayati, 2022), Dahuri dalam Labolo, 2011, 233. Berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau beraneka keindahannya alamnya dan penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa memiliki potensi wisata alam, sosial, dan budaya yang besar. Potensi dan sumber daya alam

yang ada harus dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi objek wisata yang menarik. Indonesia merupakan Negara Tujuan Wisata (*Tourist Destination Country*) hal ini berarti akan semakin di tuntut kesiapan SDM yang kompetensi dan profesional untuk mengatasi pertumbuhan pariwisata yang lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan fenomena yang terjadi di kabupaten pelalawan, yaitu objek wisata Bono yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata namun peran ini belum jelas dan efektif.

Konsep pariwisata pada perkotaan saat ini berkembang seiring dengan perkembangan pariwisata perkotaan di seluruh dunia. Dimana Padang merupakan gerbang juga pusat perdagangan bagi kawasan pedalaman sejak akhir abad ke-17. Dengan posisi yang cukup strategis karena berada pada bagian tengah sisi barat pulau Sumatera (DPUPR, 2006: 9). Refni Yulia, dkk (2017: 18) menyatakan bahwa Padang merupakan salah satu kota warisan kolonial belanda yang mempunyai daya tarik wisata jika dikembangkan dengan baik akan menjadi ikon wisata baru yang berbudaya dan bernilai sejarah. Meri Erawati dalam Phill, dkk (2015: 153) menyatakan bahwa kota tua telah ditetapkan sebagai kawasan wisata cagar budaya, maka dari itu perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh (Putra, 2022) 1993 berpendapat bahwa dalam konteks Provinsi Riau yang dikenal sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya Kebudayaan Melayu juga memiliki berbagai kesenian, salah satu yang sangat istimewa adalah seni Teater Tradisional karena memiliki karakteristik yang unik. Begitu pula dengan salah satu Kabupaten Indragiri Hilir di daerah Provinsi Riau yang merupakan daerah dengan kebudayaan majemuk yang kemudian melahirkan ragam budaya dan seni. Melalui hasil data awal yang sesuai dengan observasi peneliti yang didukung kuat oleh sumber buku dengan judul Seni Pertunjukan Tradisional: pengembangan pada Teater Rakyat Daerah Riau perlu dilakukan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali dalam mendalami Kebudayaan Teater Tradisi. Pada konteks ini maka yang bertanggung jawab dalam pengembangan Kebudayaan Teater Tradisi Mamanda dan Bangsawan adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam penyelenggaraan teater tradisi Pemerintah Kabupaten dibantu oleh Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan.

Pariwisata di dalam Undang-Undang No 10 pada tahun 2009 pada pasal 1 ayat (3) adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas atas layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Dan terdapat juga Undang-Undang kepariwisataan No 9 Tahun 1990 "Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait di bidangnya". Dalam menjalankan kewenangan dalam sektor pariwisata, salah satu daerah yang diberikan yaitu Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas 779485 km yang terdiri dari 16 kecamatan diantaranya yaitu: Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Bonai Darussalam, Rambah, Rambah samo, Rambah Hilir, Tandun, Tambusai, Tambusai Utara, Bangun Purba, Kepenuhan, Ujung Batu, Kabun, Pendalian IV Koto.

Kabupaten Rokan Hulu selain terkenal dengan sumber daya alam perkebunan, pertambangan, dan perikanan, ternyata juga banyak menyimpan keindahan pariwisata yang menjadi daya tarik seperti wisata alam, wisata buatan, dan daya tarik wisata religi. Oleh karena itu pengembangan pariwisata harus terencana dan terkelola dengan baik supaya hubungan antar objek wisata dengan masyarakat maupun pengunjung dapat memaksimalkan hasil yang positif (Yuslaini et al., 2024)

Pariwisata masih merupakan kegiatan yang relatif baru bagi banyak daerah di Indonesia, dan belum banyak memiliki pengalaman mengembangkan sektor perekonomian, Perkembangan pariwisata akan menjadi fenomena besar. Hal ini bertujuan untuk mencapai pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan serasi dan maksud tujuan pengembangan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah (Kurnia, 2015)

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dimanfaatkan oleh berbagai daerah di Indonesia dalam meningkatkan kemandirian dan mensejahterkan masyarakatnya. Sektor pariwisata dapat digunakan menjadi salah satu sektor andalan sebagai sumber ekonomi bagi suatu daerah.

Pendapat ini didukung juga oleh per-Undang-Undang Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa "penyelenggaraan lepariwisataan ditunjukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas

dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunandaerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa”

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sektor pariwisata dapat diajdikan sebagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan dalam meingkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dan onjek untuk mendatangkan investor serta meciptakan konsumsi yang baik dari dalam maupun luar daerah. (Kurnia, 2015)

potensi yang dimilikindan mengharuskan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerinthaan dan pengembangan potensi daerah. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengann melihat potensi-potensi yang dimilikinya mmapu mengelolahnya dengan baik serta memperjuangkannya. Dalam kritis global. Salah satu sektor industri yang tidak merasakan dampaknya adalah kepariwisataan. Oleh karena itu, dikalangan penentu kebijakan perlu diingatkan bahwa dengan dilakukannya pembangunan sektor kepariwisataan secara tidak langsung kemiskinan (*poverty allevication*). Pariwisata yang dikelola dengan baik juga dapat menambah salah satu pemasukan Pendapat Asli Daerah (PAD).

Dengan adanya Otonomi Daerah yang diberlakukan di Indonesia dituntut harus meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), agar dapat membiayai pengembangan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan APBD tentunya berbagai cara yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah melalui pembangunan dan perkembangan pariwisata dengan pemanfaatan sumber daya alam dan buaya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk melakukan pembangunan dan pengembangan pariwisata dibutuhkan suatu perencanaan yang strategis dan terarah secara terintegral, agar pembangunan dan pengembangan sesuai dengan apa yang diharapkan baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan sumber daya alam.

Studi kasus dari beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hulu adalah objek wisata Air Panas Suaman. Keistimewaan objek wisata Air Panas Suaman ini adalah memiliki potensi alam yang sangat besar walaupun tidak sepenuhnya di kelolaoleh pemerintah namun tetep banyak di kunjungi oleh masyarakat karena memiliki daya tarik tersendiri. Terdapat dua sumber air panas yang berbeda. Pada sisi kiri suhu panasnya mencapai 60

derajat celcius dan sisi kanan suhunya berkisar antar 48-55 derajat celcius. Air panas suaman ini bisa mengobati penyakit kulit karena mengandung belerang. Selanjutnya dapat dilihat jumlah pengunjung Objek Wisata Tiga tahun terakhir yaitu:

NO	OBJEK WISATA	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Air Panas Suaman	728	12693	16258
2.	Air panas Hapanasan	1004	5650	7021
3.	Danau Cipogas	660	7313	7687

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rokan Hulu

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2023 jumlah Pengunjung Objek Wisata Air Panas Hapanasan dan Danau Cipogas mengalami kenaikan, begitu juga dengan Air Panas Suaman yang mengalami kenaikan pengunjung dari tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah pengunjung pada wisata tersebut dikarenakan Dinas Priwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu cukup berperan dalam mengembangkan Objek Wisata tersebut, sehingga minat pengunjung mengalami kenaikan cukup banyak.

Salah satu penyebab bertambahnya jumlah kunjungan adalah sedikit teroptimalnya pengelolaan objek wisata Air Panas Suaman, sehingga mendapatkan respon positif dari pengunjung objek wisata. Pengelolaan objek wisata Air Panas Suaman juga masih bersifat apa adanya. Di Air Panas Suaman ini juga sering digunakan pengunjung sebagai terapi kesehatan terutama untuk kesehatan kulit.

KAJIAN PUSTAKA

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka di perlu diberikan beberapa konsep teori dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang dapat memberikan solusi yang erat terkait dengan masalah penelitian ini yang telah dirumuskan, agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya, terutama dalam menganalisis data, diantaranya:

2.1 Pengertian Peranan

Menurut hasil penelitian (Fitriana et al., 2020) peranan adalah suatu tanggung jawab yang dimiliki oleh individu atau lembaga pemerintah yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugas mereka. Selain itu Peranan juga merupakan suatu dinamisasi yang terdiri dari penggunaan atau statis dari suatu pihak yang memiliki tanggung jawab. Dinamisasi ini biasanya disebut subjektif.

Adapun Karl dan Rosenzweig berpendapat bahwa peranan berkaitan dengan kegiatan seseorang yang memiliki kedudukan, sehingga dapat disimpulkan apakah peranan adalah sebuah suatu perilaku atau tindakan yang terkait dengan posisi seseorang dalam sebuah organisasi (Fitriana et al., 2020)

Didasarkan pada pendapat diatas, peneliti mengevaluasi bahwa peranan mencakup semua tindakan yang dilakukan seseorang dalam sebuah organisasi untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota organisasi. Hal ini berarti bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Kebudayaan dan Pariwisata jika ia telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuatu dengan fungsi masing-masing bidang yang ada (Siam, 2015)

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan suatu tanggung jawab yang dimiliki oleh individu atau lembaga pemerintah yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat sesuai fungsi dan tugas mereka, peranan dapat bersifat formal dan informal tergantung pada norma yang berlaku dalam suatu lingkungan.

2.1.1 Indikator Peranan

Ada beberapa indikator peranan menurut (Kholidah, 2022) sebagai berikut :

1. Wewenang yaitu merasa pasti dengan seberapa besar yang dimiliki dan mempunyai rencana yang jelas untuk pekerjaan.
2. Tanggung Jawab yaitu sikap yang berkaitan dengan janji maupun tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, adat-istiadat yang dianut warga masyarakat.
3. Kejelasan Tujuan yaitu yang menjadi tanggung jawab serta penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan menjadi jelas.

4. Cakupan Pekerjaan yaitu sebagai cakupan yang bertujuan agar kajian, penelitian maupun pembahasan lebih tararah, efektif dan efisien dalam mengurai aspek, objek yang dikaji dan diteliti.

Adapun indikator peranan menurut (Yuslaini et al., 2024) yaitu :

1. Perencanaan Pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan pengembangan pariwisata. Dimana pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif.
2. Pembangunan Pariwisata, umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata.
3. Kebijakan Pariwisata, kebijakan merupakan perencanaan jangka pnjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya.
4. Peraturan Pariwisata, peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan yang memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya.

Indikator menurut (Huljannah, 2024) yaitu:

1. Pengembangan SDM, keberadaan SDM berperan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencangkup wisatawan atau sebagai pekerja.
2. Peraturan Pariwisata, dimana peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah itu yang diterapkan oleh dinas pariwisata, dimana peraturan itu sudah masuk dalam peraturan pemerintah.

2.2 Pengertian Pengembangan Objek Wisata

Pengembangan pariwisata di suatu wilayah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan di wilayah tersebut. Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan pariwisata berpengaruh cukup besar terhadap majunya pariwisata yang menjadi salah satu industri penunjang perekonomian di suatu negara. Dalam bidang pariwisata bertugas untuk mengembangkan wisata (Balady et al., 2024)

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pemerintah merupakan salah satu stakeholder dalam pengelolaan bidang pariwisata. Pemerintah juga memiliki fungsi sebagai pembuat berbagai kebijakan tentang pariwisata pada suatu daerah serta berperan dalam meningkatkan devisa dan pendapatan asli daerah melalui bidang pariwisata (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20, 2005) (Katuwu et al., 2023)

Teori yang berkaitan dengan penelitian pengembangan pariwisata yaitu melainkan teori manajemen yang ditemukan oleh G. R. Terry. Penelitian ini mengacu pada fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R. Terry dalam bukunya Principles of Management, membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan), Controlling (pengawasan) (Suriani et al., 2023)

Theory AISAS / *attention, interest, search, action, share* berdasarkan sebagai pendekatan dalam penelitian untuk mengamati sekaligus menganalisis interaksi hingga rangkaian promosi yang berlangsung didalam akun instagram atau media sosial lainnya. Teori AISAS itu sendiri memiliki latar belakang tinjauan pada kajian komunikasi pemasaran digital, sehingga diharapkan dapat tersebut memaksimalkan alur penyampaian dapat informasi khususnya terhadap produk- produk pariwisata kedaerahan untuk mendukung program percepatan pariwisata berkelanjutan di tengah maraknya perkembangan teknologi sekarang ini, maupun mampu melihat ketertarikan publik sebagai target dalam pertumbuhan sektor (Ningrum, 2023)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan tujuan utama dari pengembangan objek pariwisata adalah untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertanian lokal, sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya setempat.

2.1.2 Indikator Pengembangan Objek Wisata

Menurut hasil penelitian (Khalim & Fitriyana, 2023) menjelaskan indikator kinerja dalam pengembangan wisata, dalam hal penelitian ini yang digunakan adalah bagian atau Section C yaitu Cultural Sustainability, dengan indikator sebagai berikut:

1. C(a) Melindungi warisan budaya

a. Perlindungan aset budaya

Destinasi memiliki kebijakan dan sistem untuk mengevaluasi aset-aset budaya dan bentang alam budaya.

b. Artefak budaya

Destinasi memiliki Undang-Undang yang ditegakkan dan dikomunikasikan kepada publik, termasuk badan usaha pariwisata dan pengunjung.

c. Warisan tak-benda

Destinasi menyokong perayaan dan perlindungan warisan budaya tak benda, termasuk tradisi, seni, musik, bahasa, gastronomi setempat dan aspek aspek lain tentang identitas dan kekhasan setempat.

d. Akses tradisional

Destinasi memonitor, melindungi dan bila perlu merehabilitasi atau merestorasi akses masyarakat setempat ke situs-situs alam dan budaya.

e. Hak kekayaan intelektual

Destinasi memiliki sebuah sistem untuk kontribusi kepada perlindungan dan preservasi hak kekayaan intelektual masyarakat dan perorangan.

2. C(b) Mengunjungi situs budaya

a. Pengelolaan situs budaya pada pengunjung budaya

Destinasi memiliki sebuah sistem untuk mengelola pengunjung didalam dan panduan untuk perilaku pengunjung di situs-situs dan peristiwa budaya yang sensitif disediakan bagi pengunjung, operator perjalanan dan pemandu wisata sebelum dan pada saat kunjungan.

b. Interpretasi situs

Materi interpretasi yang akurat meninformasikan pentingnya aspek- aspek budaya dan alam dari situs yang dikunjungi diberikan kepada pengunjung.

Beberapa indikator pengembangan objek wisata menurut (Eraku et al., 2023) yaitu:

- a. Keterkaitan indikator lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam memenuhi indikator lingkungan dengan cara ikut serta menjaga kebersihan yang ada di wisata dengan program pemerintah.
- b. Keterkaitan indikator ekonomi, keterlibatan wisatawan dalam memenuhi indikator ekonomi dengan mendatangi Kawasan wisata sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara menyewa jasa serta membeli produk-produk yang dijual disekitar wisata (Monoarfa et al., 2020). Keterlibatan masyarakat setempat dengan cara mendirikan usaha-usaha jasa maupun berjualan disekitar wisata.
- c. Keterkaitan indikator sosial, program pemerintah yang selaras dengan indikator sosial adalah sapta pesona. Sapta Pesona dan sosial budaya saling terkait dan saling memperkuat dalam konteks pariwisata berkelanjutan, keramahan masyarakat dalam berinteraksi dengan wisatawan dapat memenuhi indikator sosial.

1. *Dimensi Accessibility* (Aksesibilitas)

salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan objek wisata adalah aksesibilitas atau kemudahan wisatawan dalam mengunjungi kawasan objek wisata tersebut baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara.

- a. Indikator Sarana dan Prasarana, Sarana dan Prasarana merupakan fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh pihak Pemerintah ataupun Pengelola, misalnya penyediaan sarana transportasi umum untuk para wisatawan untuk mengunjungi objek wisata tersebut.
- b. Indikator Transportasi, Ketersediaan dan kemudahan transportasi sangat penting dalam kemajuan dan pembangunan suatu objek wisata karena dengan adanya transportasi dapat memudahkan para wisatawan untuk mengunjungi objek tersebut. akses transportasi menuju ke objek wisata dapat dikatakan cukup baik.

METODE PENELITIAN

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Penelitian kualitatif merujuk pada jenis informasi atau data yang menggambarkan kualitas atau sifat suatu fenomena, Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah, fenomena, atau situasi, yang tidak dapat dijelaskan dengan hanya angka atau statistik. Dalam penelitian, ini melibatkan pengumpulan data melalui

wawancara, diskusi kelompok, observasi, atau studi kasus, yang menghasilkan narasi atau deskripsi yang lebih luas dan tidak terstruktur.

1. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
 - a. Data primer adalah sekumpulan data yang secara langsung diberikan kepada peneliti dari sampel primer atau lokasi penelitian. Seperti hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti dan wawancara pihak terkait, dalam hal ini pada pengurus dan juga pengunjung objek wisata air panas suaman di kabupaten rokan hulu.
 - b. Data skunder merupakan data berkas yang mengacu ringkasan data dikumpulkan dari beberapa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, jumlah karyawan, tugas dan wewenang masing-masing bagian, data skunder ini adalah data jumlah pengunjung pertahunnya pada objek wisata air panas suaman di kabupaten rokan hulu.

2. Teknik Analisa Data

Analisa proses penelitian dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap seleksi yang memfokuskan pada abstraksi, penyederhanaan dan transformasi data mentah dari dokumen tertulis yang diperiksa. Data yang tidak relevan atau berulang di hapus, sedangkan informasi penting disimpan sesuai tema.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah fungsi penyusunan dari laporan penelitian, yang dilakukan sedemikian rupa hingga memungkinkan untuk dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

c. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan ini dilakukan dengan membandingkan hasil data dengan teori atau wawancara lain untuk memastikan validitasnya.

HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pengurus dan anggota Air Panas Suaman Desa Rambah Tengan Hulu dan juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pengurus dari Air Panas Suaman Terdiri dari Kades, Sekdes, kadus, serta anggota yang terlibat aktif partisipasi dalam kegiatan mengelola Air Panas Suaman. Sedangkan pengurus Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, dan Kepala Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur, dimana peneliti mengikuti pedoman wawancara tetapi tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk menyampaikan pendapat dan pengalaman mereka. Wawancara dilaksanakan di lokasi Kantor Kepala Desa Rambah Tengah Hulu dan di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu. Proses wawancara berlangsung dalam suasana yang santai dan terbuka, sehingga informan merasa nyaman untuk berbagi informasi. Karakteristik dari para informan dapat ditemukan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Informan Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Informan
1.	28 Tahun	2 Orang
2.	29 Tahun	2 Orang
3.	30 Tahun	1 Orang
4.	37 Tahun	1 Orang
5.	49 Tahun	1 Orang
6.	50 Tahun	2 Orang
7.	52 Tahun	1 Orang
	Total	10 Orang

Sumber: Data Primer Peneliti, 2025

Tabel 4. 2 Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Informan
----	---------------	-----------------

1.	Laki-Laki	6 Orang
2.	Perempuan	4 Orang
	Total	10 Orang

Sumber: Data Primer Peneliti, 2025

Tabel 4. 3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Informan
1.	SD	-
2.	SMP	-
3.	SLTA	3
4.	D3	-
5.	S1	6 Orang
6.	S2	1 Orang
	Total	10 Orang

Sumber: Data Primer Peneliti, 2025

Tabel mengenai karakteristik informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai narasumber yang akan menjadi kunci dalam memperoleh informasi. Hasil data primer yang di peroleh dari hasil wawancara dilapangan menggunakan pedoman wawancara. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kreteria tertentu berdasarkan tujuan peneliti. Karena informasi tersebut dianggap memiliki pengetahuan yang relevan dan penting bagi kelancaran penelitian. Adapun informasi lebih lanjut mengenai informan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 4 Data Informan Penelitian

No	Informan	Tempat, Tanggal Lahir	Usia	Jenis Kelamin
1.	DS	Pawan, 05 Mei 1975	50 Tahun	Laki-Laki
2.	AN	Pawan, 18 Agustus 1988	37 Tahun	Laki-Laki
3.	AS	Pekanbaru, 07 Mei 1975	50 Tahun	Laki-Laki
4.	R	Pawan, 27 April 1997	28 Tahun	Perempuan
5.	TS	Pawan, 10 Juni 1996	29 Tahun	Perempuan
6.	H	Rokan, 06 Juli 1973	52 Tahun	Laki-Laki
7.	KH	Dalu-Dalu, 11 April 1976	49 Tahun	Laki-Laki
8.	RIPT	Dalu-Dalu, 27 Mei 1997	28 Tahun	Perempuan
9.	GS	Tanjung Balai, 30 Agustus 1996	29 Tahun	Laki-Laki
10.	I	Pekanbaru, 05 Mei 1995	30 Tahun	Perempuan

Sumber: Kantor Kepala Desa Rambah Hulu dan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.4 menyajikan data demografis dari informan yang berpartisipasi dalam penelitian. Data mengenai tempat tanggal lahir, usia, dan jenis kelamin memberikan pemahaman lebih lanjut tentang latar belakang informan, yang dapat mempengaruhi pandangan dan pengalaman mereka terkait objek wisata air panas suaman. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara yang di sampaikan kepada pengelola air panas suaman dan dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten rokan hulu. Dalam hal ini peneliti menetapkan bahwa informan yang terlibat terdiri dari pengelola objek wisata air panas suaman dan beberapa anggotanya, dan juga kepala dinas pariwisata dan kebudayaan dan beberapa anggotanya.

1.1 Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Mengembangkan Objek Wisata Air Panas suaman di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Mengembang Objek Wisata Air Panas Suaman di Kabupaten Rokan Hulu sangat penting dan mencakup berbagai aspek strategis. Dengan sinergi antar pihak dan strategi yang tepat dari Dinas dab Kebudayaan, objek wisata air panas suaman memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata andalan di Rokan Hulu yang ramah lingkungan, mendukung ekonomi lokal, dan berdaya saing yang tinggi di tingkat

ragional bahkan internasional. Sebagaimana dalam wawancara dengan bapak H yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu:

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan penting dalam mengembangkan objek wisata, karena dinas pariwisata dan kebudayaan adalah penggerak utama yang menghubungkan antara potensi alam, masyarakat lokal, dan kebijakan pemerintah”.

Kemudian menurut bapak KH yang menjabat sebagai Kepala Bidang Destinasi menjelaskan mengenai peranan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam mengembangkan objek wisata:

“Peranan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam mengembangkan objek wisata cukup maksimal, dimana dinas pariwisata dan kebudayaan bertanggung jawab untuk menyusun rencana pengembangan jangka panjang serta memastikan bahwa kawasan tersebut memiliki fasilitas dasar yang mendukung kenyamanan pengunjung/wisatawan”.

Menurut ibu RIPT yang menjabat sebagai Adyatama Kepariwisata dan Ekraf menambahkan pendapatnya bahwa:

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan cukup baik, dimana peran dinas pariwisata dan kebudayaan adalah mengenalkan destinasi kepada publik melalui media digital. Dinas juga tidak hanya mengembangkan wisata dari alam, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal yang melekat pada kawasan seperti air panas suaman tetap dilestarikan”.

Menurut bapak AN sebagai Sekdes Desa Rambah Tengah Hulu berpendapat:

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan besar dalam memberikan arahan dan regulasi. Mereka membantu memahami standar pengelolaan objek wisata yang baik”.

Menurut bapak AS sebagai Kasi Pemerintah Desa Rambah Tengah Hulu berpendapat:

“Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sangat membantu, terutama saat desa ingin menetapkan kawasan tertentu sebagai objek wisata resmi. Ini penting agar pengembangan wisata tidak menyalahi aturan tata ruang atau hukum lainnya”.

Menurut bapak DS sebagai Kadus Desa Rambah Tengah Hulu berpendapat:

“Peran dinas pariwisata dan kebudayaan sangat membantu, yang mana dulu objek wisata yang ada di desa rambah tengah hulu belum banyak dikenal, sekarang pengunjung sedikit mulai meningkat sejak ada program dari dinas”.

Menurut ibu R sebagai Kaur Umum Desa Ramnbah Tengah Hulu berpendapat:

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi mereka menyarankan agar kami melibatkan BUMDes dan masyarakat lokal dalam pengelolaannya, agar manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan oleh warga”.

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga membantu menyusun perencanaan anggaran yang lebih terarah untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata, mereka juga membuka akses kepada berbagai sumber, baik dari APBD maupun program bantuan lainnya”.

Dari informasi yang di peroleh dari beberapa wawancara diatas disimpulkan bahwa Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Mengembangkan Objek Wisata Air Panas Suaman di Kabupaten Rokan Hulu memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan objek wisatanya melalui destinasi wisata ke tingkat yang lebih luas, serta keberlanjutan kerja sama antara desa dan dinas sangat di perlukan untuk menjadikan objek wisata sebagai aset yang berdaya saing dan berkelanjutan. Namun, ada juga beberapa dari informan yang berpendapat lain yang menunjukkan pandangan yang berbeda.

Menurut bapak AS sebagai Kasi Desa Rambah Tengah Hulu berpendapat:

“Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum maksimal karena kebutuhan yang disediakan untuk akses objek wisata belum memadai”.

Menurut ibu R sebagai Kaur Umum Desa Rambah Tengah Hulu berpendapat:

“Meskipun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan datang memberikan pelatihan atau sosialisasi, tapi tindak lanjutnya sering kurang jelas, setelah pelatihan selesai, tidak ada pendampingan lanjutan atau evaluasi yang konkret”.

Menurut ibu TS sebagai Kaur Keuangan juga berpendapat:

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah berperan baik, namun untuk dukungan anggaran dari dinas masih terbatas. Untuk pembangunan fasilitas wisata dasar saja desa sering mengadalkan dana desa, padahal potensi wisata ini harusnya bisa menjadi perhatian penuh pemerintah daerah”.

Menurut bapak G sebagai masyarakat setempat berpendapat:

“Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sangat di hargai, akan tetapi kami sering mendengar rencana dari dinas tentang pengembangan objek wisata air panas suaman,

tetapi sebagian fasilitas belum ada perubahan, salah satunya akses jalan menuju objek wisata belum di perbaiki secara serius”.

Menurut ibu I sebagai masyarakat setempat juga berpendapat:

“Kegiatan pariwisata sering di kelola hanya oleh aparat desa, sedangkan sebagai masyarakat sekitar kurang dilibatkan. Padahal kami juga ingin berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari wisata ini”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Mengembangkan Objek Wisata memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan objek wisata. Banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah berupaya memenuhi kebutuhan dasar atau fasilitas untuk mengembangkan objek wisata tersebut. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selalu dianggap siap untuk berkontribusi memenuhi kebutuhan yang di perlukan untuk perkembangan objek wisata tersebut. Namun, beberapa pandangan juga menunjukkan bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum sepenuhnya maksimal. Beberapa pendapat menegaskan bahwa fasilitas yang ada di objek wisata belum sepenuhnya memadai terutama akses jalan menuju objek wisata yang belum ada perbaikan yang serius sampai saat ini.

Selain itu, diharapkan agar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat semakin meningkatkan perannya dalam pengembangan objek wisata, khususnya ditingkat desa. Diharapkan Dinas tidak hanya fokus pada destinasi wisata yang sudah berkembang, tetapi juga memberikan perhatian yang merata terhadap potensi wisata baru seperti Air Panas Suaman. Dukungan berupa pembangunan infrastruktur, pelatihan masyarakat, promosi yang luas, serta bantuan pendanaan sangat dibutuhkan untuk mempercepat kemajuan wisata lokal.

1.2 Hambatan pelaksanaan Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Mengembangkan Objek Wisata Air Panas Suaman di Kabupaten Rokan Hulu

Hambatan pelaksanaan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Mengembangkan Objek Wisata adalah berbagai hambatan dan rintangan yang menghalangi proses perkembangan objek wisata air panas suaman di kabupaten rokan hulu: Sebagaimana

dalam wawancara dengan bapak H yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu:

"Dalam pengembangan objek wisata, Dinas menghadapi tantangan dalam keterbatasan anggaran, dana yang tersedia lebih banyak digunakan untuk operasional rutin daripada pengembangan strategi"

Menurut bapak KH yang menjabat sebagai Kepala Bidang Destinasi menjelaskan mengenai peranan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam mengembangkan objek wisata:

"Dinas pariwisata dan kebudayaan memang berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan yang di perlukan untuk objek wisata tersebut, tetapi tantangan dalam pengembangan objek wisata ini kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat"

Menurut ibu RIPT yang menjabat sebagai Adyatama Kepariwisata dan Ekraf menambahkan pendapatnya bahwa:

"Salah satu hambatan yang kami hadapi adalah isu keberlanjutan dan lingkungan, dimana lahan dan lingkungan yang digunakan untuk objek tersebut masih kurang dan rata-rata masih milik masyarakat"

Menurut bapak AN sebagai Sekdes Desa Rambah Tengah Hulu berpendapat:

"Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berusaha menyediakan kebutuhan objek wisata, tetapi dinas kesulitan karena kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat"

Menurut bapak AS sebagai Kasi Pemerintah Desa Rambah Tengan Hulu berpendapat:

"Saya melihat meskipun dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah berupaya, namun koordinasinya kurang antar instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta sehingga dapat menghambat pengembangan pariwisata terpadu"

Menurut bapak DS sebagai Kadus Desa Rambah Tengan Hulu berpendapat:

"Salah satu hambatan yang dihadapi dinas pariwisata dan kebudayaan adalah ketersediaan anggaran. Meskipun dinas pariwisata berusaha memenuhi kebutuhan objek wisata, tetapi dinas sering kali kekurangan anggaran untuk memenuhi permintaan masyarakatnya"

Menurut ibu R sebagai Kaur Umum Desa Rambah Tengah Hulu berpendapat:

"Tantangan utama yang di hadapi dinas pariwisata dan kebudayaan adalah keterbasan anggaran dari pemerintah"

Menurut ibu TS sebagai Kaur Keuangan juga berpendapat:

“Tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata”

Menurut bapak G sebagai masyarakat setempat berpendapat:

“Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting, kami harap dinas bisa lebih respon terhadap permintaan masyarakat, agar kebutuhan objek terpenuhi dengan lebih baik”

Menurut ibu I sebagai masyarakat setempat juga berpendapat:

“Dinas pariwisata dan kebudayaan sudah berperan baik dalam menyediakan kebutuhan objek wisata, tetapi kami juga masih merasa bahwa sarana dan prasana yang ada harus lebih di evaluasi lagi, karena dalam hal ini masih banyak sarana dan prasarana yang belum terpenuhi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, hambatan pelaksanaan peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan Objek Wisata Air Panas Suaman di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh dinas, sehingga program pengembangan hanya dapat dilaksanakan secara terbatas dan belum menyentuh aspek strategis seperti peningkatan fasilitas wisata dan promosi. Selain itu, akses menuju lokasi wisata masih belum memadai, di mana kondisi jalan yang rusak dan jembatan yang tidak layak menjadi kendala bagi wisatawan untuk berkunjung.

Hambatan lain yang dihadapi adalah kurangnya keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan objek wisata, baik dari segi partisipasi langsung maupun dukungan terhadap kegiatan pengembangan. Koordinasi antara dinas dengan pihak swasta dan instansi terkait juga masih kurang optimal, yang berdampak pada lambatnya proses pengembangan yang berkelanjutan. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan terlatih di bidang kepariwisataan turut menjadi kendala dalam mewujudkan pengelolaan wisata yang efektif dan menarik bagi wisatawan. Seluruh hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari pemerintah daerah, masih diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan kolaboratif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengembangan Objek Wisata Air Panas Suaman secara maksimal.

2. PEMBAHASAN

2.1 Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Mengembangkan Objek Wisata Air Panas Suaman

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian pustaka, peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan Objek Wisata Air Panas Suaman di Kabupaten Rokan Hulu mencerminkan implementasi dari teori peran organisasi menurut G.R. Terry yang menekankan pada empat fungsi utama: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dinas telah menjalankan peran tersebut dengan berbagai program seperti pengembangan infrastruktur dasar, promosi, serta upaya pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata. Temuan ini juga selaras dengan indikator peran menurut (Kholidah, 2022) seperti wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan, dan cakupan pekerjaan yang secara umum sudah dilaksanakan oleh dinas meskipun belum sepenuhnya optimal.

Ketika dibandingkan dengan penelitian terdahulu seperti oleh (Gunadi & Rusli, 2022) yang menyatakan bahwa pengembangan wisata di Rokan Hulu masih terkendala oleh anggaran dan sumber daya manusia, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala tersebut masih berlanjut, namun dinas telah berupaya memperbaiki pengelolaan secara bertahap. Sementara itu, jika dibandingkan dengan studi oleh (Huljannah, 2024) mengenai pengembangan Pantai Terih di Batam, keberhasilan di sana banyak ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dan dukungan regulasi yang kuat. Hal ini memberikan pelajaran bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rokan Hulu juga perlu mengadopsi pendekatan partisipatif dan memperkuat aspek regulatif untuk mendukung pengembangan Air Panas Suaman secara berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah berjalan dalam kerangka teori yang relevan, tantangan berupa keterbatasan dana, fasilitas, dan sinergi antar pemangku kepentingan masih perlu diatasi melalui strategi kolaboratif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta promosi yang lebih modern dan digital. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan terintegrasi dalam pengembangan wisata berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat sebagaimana diusulkan dalam literatur dan penelitian sebelumnya.

2.2 Tantangan yang di hadapi dinas pariwisata dan kebudayaan

Meskipun dinas pariwisata dan kebudayaan memiliki peran penting, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Hambatan-hambatan ini sejalan dengan teori sistem kelembagaan dalam pembangunan pariwisata yang dikemukakan oleh G.R. Terry, khususnya pada aspek "organizing" dan "controlling" yang belum berjalan optimal karena terbatasnya kapasitas struktural dan sumber daya. Dalam teori tersebut, organisasi yang efektif harus mampu membangun struktur yang mendukung pelaksanaan perencanaan dan kontrol terhadap hasil. Namun dalam konteks pengembangan Air Panas Suaman, dinas belum mampu mengorganisir semua pihak yang terlibat secara sinergis, termasuk masyarakat dan pelaku usaha. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian (Gunadi & Rusli, 2022) yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata di Rokan Hulu secara umum terhambat oleh minimnya anggaran dan sumber daya manusia.

Sementara itu, dibandingkan dengan penelitian (Huljannah, 2024) yang mengkaji pengembangan Pantai Terih di Batam, terlihat bahwa partisipasi masyarakat dan regulasi yang kuat justru menjadi faktor keberhasilan utama. Hal ini menunjukkan bahwa kunci untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penguatan kolaborasi, penyediaan dana yang memadai, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pengelolaan wisata. Oleh karena itu, meskipun dinas telah berupaya menjalankan perannya, hambatan struktural dan sosial masih menjadi tantangan yang signifikan dan memerlukan pendekatan yang lebih sistematis serta partisipatif.

2.3 Rekomendasi untuk peningkatan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Mengembangkan Objek Wisata Air Panas Suaman. Pertama, Peningkatan Alokasi Anggaran, Pemerintah daerah perlu menambah alokasi dana khusus untuk pengembangan pariwisata, terutama untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas umum (WC, mushola, tempat duduk), serta sarana promosi digital. Kedua, Perbaikan Infrastruktur, Dinas terkait harus bekerja sama dengan instansi teknis seperti Dinas PUPR untuk memperbaiki jalan dan jembatan menuju lokasi wisata, agar pengunjung dapat mengakses

lokasi dengan nyaman dan aman. Ketiga, Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat Lokal, Dinas harus aktif melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan, promosi, dan pemeliharaan objek wisata agar tercipta rasa memiliki serta mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif lokal. Keempat, Konservasi dan Keberlanjutan Lingkungan, Mengintegrasikan prinsip ekowisata dan pelestarian lingkungan dalam setiap pengembangan agar potensi alam tetap terjaga dan dapat dinikmati dalam jangka panjang. Melalui langkah-langkah ini, Dinas Pariwisata dan kebudayaan dapat berfungsi lebih optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakatnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyajikan informasi yang berharga bagi pengelola objek wisata air panas suaman dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mengembangkan objek wisata air panas suaman di Kabupaten Rokan Hulu. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dinas pariwisata dan kebudayaan berperan penting dalam mengembangkan objek wisata, seperti yang diungkapkan oleh (Gunadi & Rusli, 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu dalam pengembangan objek wisata Air Panas Suaman telah dilakukan melalui berbagai upaya seperti perencanaan, pengelolaan, promosi, serta kerja sama dengan masyarakat sekitar.

Demi meningkatkan pengembangan objek wisata Air Panas Suaman, disarankan agar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu memperkuat koordinasi dengan pihak swasta dan masyarakat lokal dalam bentuk kerja sama pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Perlu juga dilakukan peningkatan anggaran untuk perbaikan infrastruktur terutama akses jalan dan fasilitas penunjang wisata seperti toilet, tempat duduk, lahan parkir, serta sarana promosi berbasis digital untuk menjangkau lebih banyak wisatawan. Selain itu, pelatihan SDM lokal dalam bidang pariwisata perlu digencarkan agar pelayanan wisata semakin profesional dan berorientasi pada kepuasan pengunjung. Dukungan kebijakan daerah dan keterlibatan stakeholder lainnya diharapkan dapat mendorong terwujudnya pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Balady, M. H., Ramadhani, F., Nuriyah, S., & Maghfirah, D. I. (2024). Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Wisata Watu Ulo Kabupaten Jember. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 71–74.
- Eraku, S. S., Pambudi, M. R., & Kobi, W. (2023). Inovasi Berkelanjutan: Memperkuat Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Wisata Hiu Paus yang Berkelanjutan di Desa Botubarani. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.34312/geojpg.v2i1.20003>
- Fitriana, F., Hilman, Y. A., & Triono, B. (2020). Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4899>
- Gunadi, A., & Rusli, Z. (2022). Implementasi Program Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 260. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8115>
- Haqqi, M. M. (2022). Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 11–28. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.11-28>
- Huljannah, A. (2024). Peranan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Terih Di Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 19–27. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/17098%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/download/17098/6433>
- Katuwu, S. A., Walewangko, E. N., & Masloman, I. (2023). Strategi Pengembangan Objek Wisata Danau Poso Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 109–120.
- Khalim, A., & Fitriyana, D. (2023). Analisa Potensi Wisata Kampung Arab Panjunan Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kota Cirebon. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(1), 169–178.
- Kholidah. (2022). *Peranan Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Mandailing Natal*. 81.
- Kurnia, R. (2015). Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bukittinggi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Pengembangan Pariwisata Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bukittinggi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, 32.
- Ningrum, D. P. (2023). Konferensi Nasional dan Call For Paper Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dalam Akun Instagram @kemenparekraf.ri (Tinjauan Teori AISAS terhadap Promosi Produk Wisata Kedaerahan). *Konferensi Nasional FEB Unwahas*, 218–234.
- Nurhidayati, A. (2022). *Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Mengembangkan Objek Wisata Bono*. <https://repository.uir.ac.id/15059/1/189110221.pdf>
- Putra, G. R. (2022). Peran Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Dan Kebudayaan Dalam Mengembangkan Kebudayaan Teater Tradisi Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 5(2), 94–107. <https://doi.org/10.36341/jdp.v5i2.2780>
- Siam, N. (2015). Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam Pengembangan Objek Wisata. *Jurnal Ipteks Terapan*, 8(4), 210–221.

<https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i4.17>

Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>

Yuslaini, N., Pemerintahan, S. I., & Riau, U. I. (2024). *Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Suaman Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu*. 91–99.